



# PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2025



## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi .....</b>	<b>i</b>
<b>Bab I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Landasan Hukum.....	3
I.3 Maksud dan Tujuan .....	8
I.4 Sistematika Penulisan.....	9
<b>Bab II Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenan.....</b>	<b>11</b>
II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenan .....	11
<b>Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....</b>	<b>27</b>
III Program dan Kegiatan .....	27
<b>Bab IV Penutup .....</b>	<b>46</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

##### **Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya adalah dokumen perencanaan untuk periode tahun berjalan, yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 343 ayat 1. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

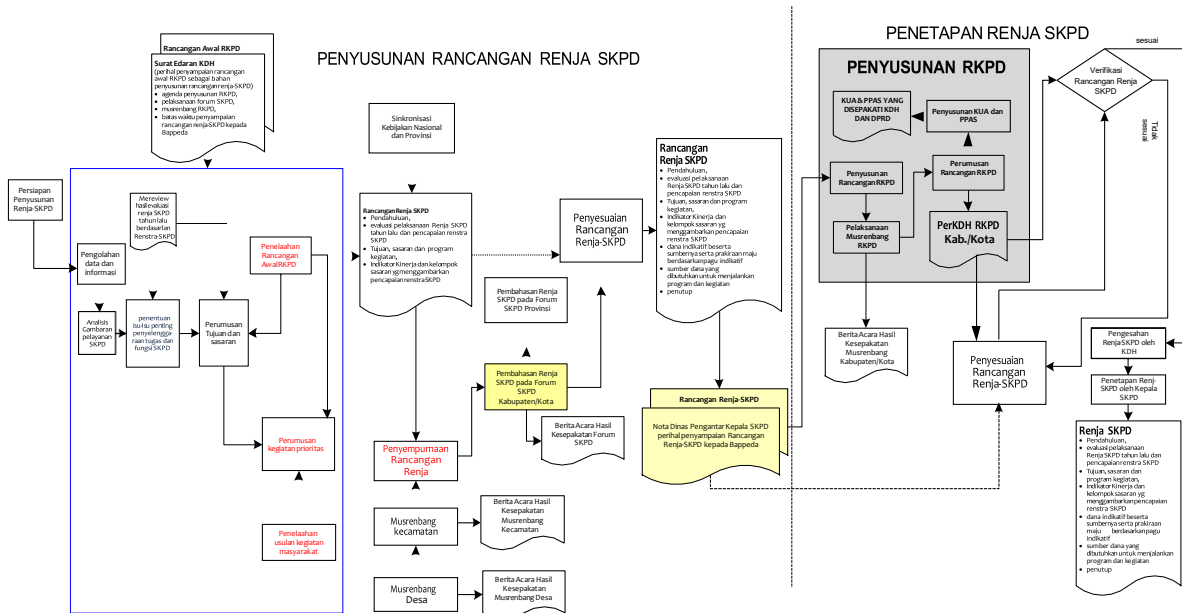
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

##### **Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Hasil Penyusunan Rencana Kerja berpedoman pada dokumen Perubahan Renja yang mengalami penyempurnaan dari dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja dan telah melalui verifikasi dokumen oleh tim Bapedalitbang. Selain itu juga berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Adapun Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

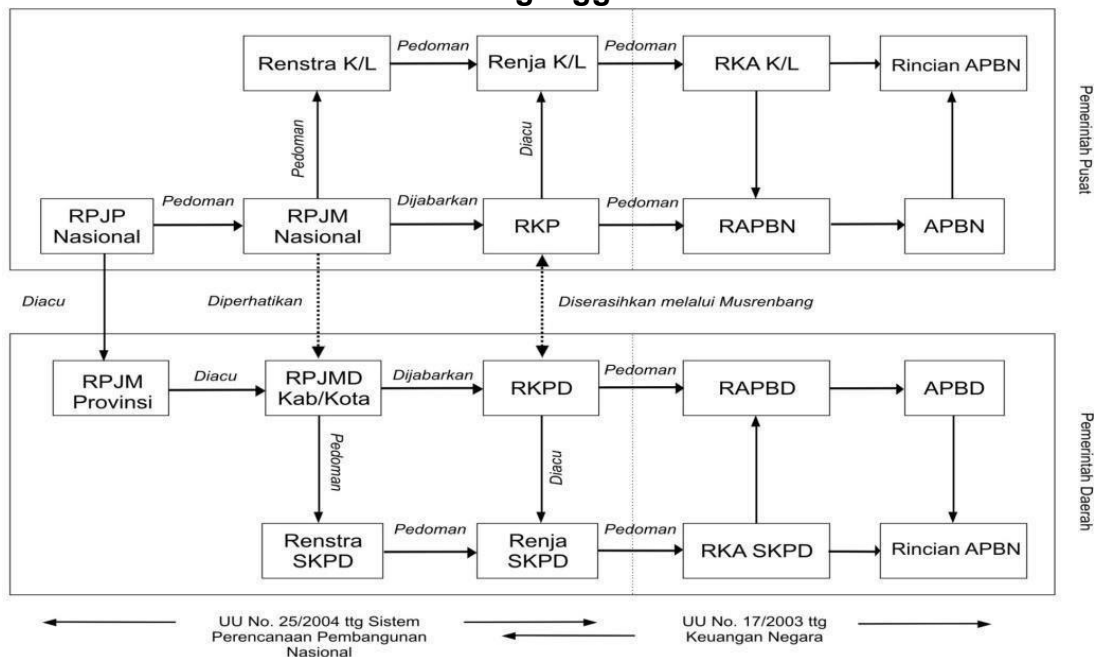
**Gambar 1.1**  
**Proses Penyusunan Rencana Kerja PD**



### Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Surabaya periode 2021 – 2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Propinsi Jawa Timur. Pada lingkup pemerintahan, rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1(satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

**Gambar 1.2**  
**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan**  
**Penganggaran**



## I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja DPMPTSP, diatur berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

- Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
  11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2022;
  16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
  17. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/282/436.1.2/2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
  18. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja

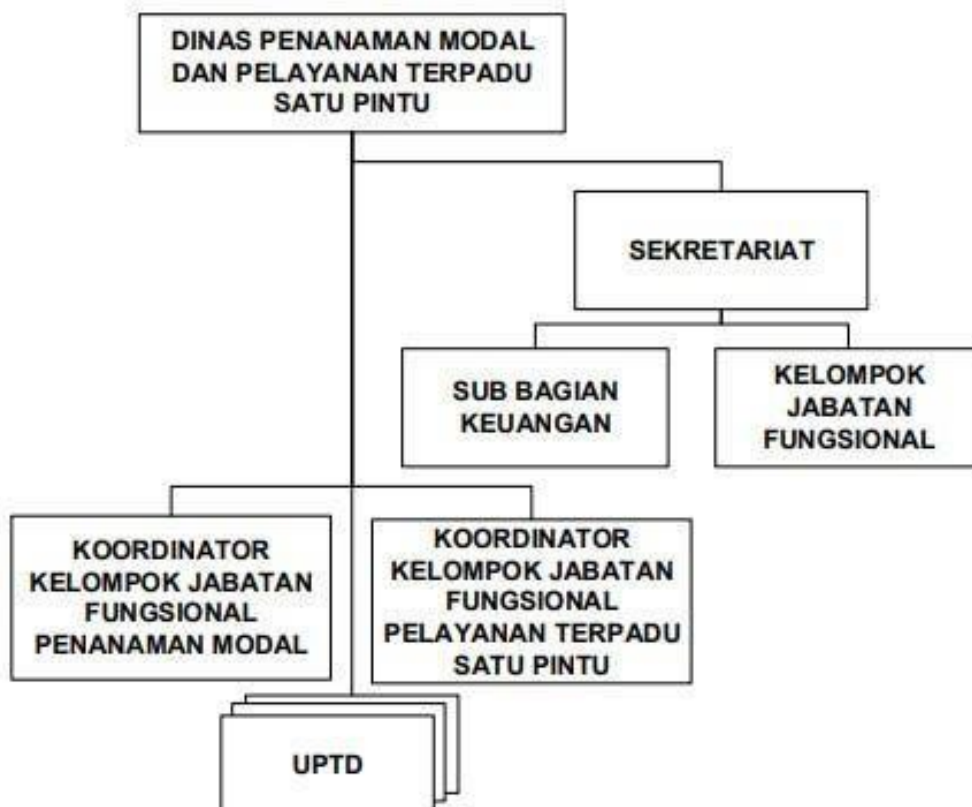
Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data/informasi dan realisasi proyek penanaman modal;
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi;
- e. pelaksanaan pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi penanaman modal;
- f. pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan penyusunan kajian pengembangan potensi penanaman modal, termasuk evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
- h. pelaksanaan penyediaan peta potensi investasi dan peluang usaha;
- i. pelaksanaan pemantauan dan pembinaan dalam rangka pengendalian penanaman modal;
- j. pelaksanaan penyusunan kebijakan pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
- k. pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis perizina berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
- l. pelaksanaan fasilitasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
- m. pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- n. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut disampaikan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Gambar 1.3**  
**Bagan Organisasi Perangkat Daerah**



### **Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintah bidang penanaman modal merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota, dan Menurut Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota disebutkan bahwa urusan penanaman modal urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga urusan penanaman modal tidak memerlukan standart pelayanan

minimal.

### **Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penentuan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan perintah dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

#### **Maksud**

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kota dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah jangka pendek (1 tahun).
- b. Menyelaraskan Rencana Strategis kota dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi Rencana Strategis Perangkat Daerah.

#### **Tujuan**

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun.
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Perangkat Daerah.

#### I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025, sebagai berikut:

##### BAB I. PENDAHULUAN

###### 1.1. Latar Belakang

Di dalam latar belakang ini dijelaskan mengenai pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat daerah dengan dokumen RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah. Serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

###### 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah ini dijelaskan secara ringkas sesuai dengan ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Kewenangan Perangkat Daerah dan ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran, ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

###### 1.3. Maksud dan Tujuan

Dijelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

###### 1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan tentang pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah tersebut.

## BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah 2021-2026 dengan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2025.

## BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan penjelasan mengenai program dan kegiatan, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

## BAB IV. PENUTUP

Dalam penutup Perubahan Renja ini dijelaskan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun jika terdapat ketidaksesuaian anggaran dengan yang dibutuhkan. Selain itu juga disebutkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja 2025 serta rencana tindak lanjutnya secara garis besar.

## BAB II

### EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

#### II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenan

##### Evaluasi Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 sampai dengan triwulan I. Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 sampai dengan triwulan I sebagai berikut :

##### Realisasi Sub Kegiatan Triwulan I Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	38 Orang/bulan	102.70%
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	5 Laporan	41.67%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	5 Laporan	41.67%
4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	0 Dokumen	0%
5	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	0 Dokumen	0%
6	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	14000 Pelaku Usaha	6.344 Pelaku Usaha	45.31%

No	Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian
7	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	12000 Kegiatan Usaha	4.610 Kegiatan Usaha	38.42%
8	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	280 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0%
9	Pengawasan Penanaman Modal	2930 Kegiatan Usaha	967 Kegiatan Usaha	33%
10	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	1 Dokumen	25%

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dari target 37 Orang/bulan terealisasi 38 Orang/bulan sehingga persentase capaian sebesar 102.70%.

2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dengan indikator Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, dari target 12 Laporan terealisasi 5 Laporan sehingga persentase capaian sebesar 41.67%.

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, dari target 12 Laporan terealisasi 5 Laporan sehingga persentase capaian sebesar 41.67%.

4. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Dengan indikator Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dari target 4 Dokumen terealisasi 0 Dokumen sehingga persentase capaian sebesar 0%

5. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota  
Dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota, dari target 3 Dokumen terealisasi 0 Dokumen sehingga persentase capaian sebesar 0%
6. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik  
Dengan indikator Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dari target 14000 Pelaku Usaha terealisasi 6.344 Pelaku Usaha sehingga persentase capaian sebesar 45.31%.
7. Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  
Dengan indikator Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha, dari target 12000 Kegiatan Usaha terealisasi sehingga 4.610 Kegiatan Usaha persentase capaian sebesar 38.42%.
8. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha  
Dengan Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dari target 280 Pelaku Usaha terealisasi 0 Pelaku Usaha sehingga persentase capaian sebesar 0%.
9. Pengawasan Penanaman Modal  
Dengan indikator Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan di verifikasi data, profil dan informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan : serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha, dari target 2930 Kegiatan Usaha terealisasi 967 Kegiatan Usaha sehingga persentase capaian sebesar 33%.
10. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan

### Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Dengan indikator Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan, dari target 4 Dokumen terealisasi 1 Dokumen sehingga persentase capaian sebesar 25%.

### **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

- Faktor-faktor terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dikarenakan realisasi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- Faktor-faktor melebihi target kinerja program/kegiatan dikarenakan adanya jumlah perizinan yang bertambah sehingga banyaknya pemohon yang melakukan perizinan secara online maupun manual seperti :
  1. Sistem online memudahkan masyarakat melakukan pengajuan permohonan perizinan.

### **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

- Meningkatkan nilai kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan;
- Meningkatkan pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik dan pertumbuhan ijin realisasi investasi;
- Meningkatkan kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana kantor dalam kondisi baik.

### **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.**

- a. Meningkatkan kualitas penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan perizinan di unit pelayanan dan klinik investasi yang memberikan kenyamanan kepada pelaku usaha.
- b. Peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik.
- c. Penyediaan potensi penanaman modal yang berbasis kawasan /proyek

yang menarik minat investor.

- d. Pemberian informasi dan pendampingan kepada masyarakat dan pelaku usaha secara intensif dalam pengurusan perizinan dan kewajiban LKPM.
- e. Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Penanaman Modal yang menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tindakan pemerintahan.

Rekapitulasi Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							K	Rp.(000)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																					
2.18		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																					
2.18.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a			15,852,45 5		13,674,89 1		16,776,98 4		2,785,04 3		-		-		-		2,785,04 3		2,785,04 3		17,57 %
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan		93 %		94.82 %		92 %		97.65 %		-		-		-		97.65 %		97.65 %		105.00%
2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13,545,52 8				12,196,86 8		2,281,24 6		-		-		-		2,281,24 6		2,281,24 6		16.84 %
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		200 %		200.00%
2.18.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13,545,52 8				12.196.86 8		2.281.24 6		-		-		-		2.281.24 6		2.281.24 6		16,84 %

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27		37		37		36		-		-		-		36		73		137.04%	
2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,306,927			4,580,116		503,797		-		-		-		503,797		503,797		21.84%	
			Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		200 %		200.00%	
			Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		200 %		200.00%	
2.18.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2,125,937			4.384.710		489.567		-		-		-		489.567		489.567		23.03%	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		12		12		2		-		-		-		2		14		100.00%	
2.18.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			180,990			195.406		14.230		-		-		-		14.230		14.230		7,86%	
			Jumlah Laporan	12		12		12		3		-		-		-		3		15		100.00%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan		Laporan										Laporan					
2.18.02		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			665,825		529,954		460,003		94,930		-		-		-		94,930		94,930	14,26 %	
			Jumlah Investor PMA/PMDN	230 Perusahaan		194.00 Perusahaan		210 Perusahaan		16.00 Perusahaan		-		-		-		16.00 Perusahaan		16.00 Perusahaan	6.96%		
2.18.02.2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota			665,825				460,003		94,930		-		-		-		94,930		94,930	14.26 %	
			Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	78 %		83.99 %		76 %		0 %		-		-		-		0 %		83.99 %	107.68%		
2.18.02.2.02.0004		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			665,825				460.003		94.930		-		-		-		94.930		94.930	14,26 %	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		4 Dokumen	100.00%		
2.18.03		Program Promosi			738,216		649,578		645,143		46,868		-		-		-		46,868		46,868	6,35%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
		Penanaman Modal																					
			Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	60 %		58.36 %		60 %		0.00 %		-		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00%	
2.18.03.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			738,216				645,143		46,868		-		-		-		46,868		46,868		6.35%
			Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	300 Calon Investor / Investor		293 Calon Investor / Investor		300 Calon Investor / Investor		0 Calon Investor / Investor		-		-		-		0 Calon Investor / Investor		293 Calon Investor / Investor		97.67%	
2.18.03.2.01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			738,216				645.143		46.868		-		-		-		46.868		46.868		6,35%
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	3 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		4 Dokumen		133.33%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
			Kabupaten/Kota																				
2.18.04		Program Pelayanan Penanaman Modal			5,864,492		3,652,335		3,053,940		637,992		-		-		-		637,992		637,992		10,88 %
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%	
2.18.04.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			5,864,492				3,053,940		637,992		-		-		-		637,992		637,992		10,88 %
			Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya dilakukan pemantauan	100000 berkas		117393 berkas		95000 berkas		31660 berkas		-		-		-		31660 berkas		149053 berkas		149.05%	
			jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang	12000 Kegiatan usaha		11602 Kegiatan usaha		12000 Kegiatan usaha		2791 Kegiatan usaha		-		-		-		2791 Kegiatan usaha		14393 Kegiatan usaha		119.94%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
			telah diterbitkan																				
2.18.04.2.01.0008			Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		1,092,027			622.579		118.503		-		-		-		118.503		118.503			10,85 %
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12000 Kegiatan Usaha		11602 Kegiatan Usaha		12000 Kegiatan Usaha		2791 Kegiatan Usaha		-		-		-		2791 Kegiatan Usaha		14393 Kegiatan Usaha		96.68%	
2.18.04.2.01.0006			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis		4,772,465			2.431.361		519.489		-		-		-		519.489		519.489			10,89 %

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
			Risiko Terintegrasi secara Elektronik																				
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	16.000 Pelaku Usaha		12174 Pelaku Usaha		14000 Pelaku Usaha		3420 Pelaku Usaha		-		-		-		3420 Pelaku Usaha		15594 Pelaku Usaha		76,087.50%	
2.18.05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			1,056,164		748,684		748,946		107,569		-		-		-		107,569		107,569		10,18%
			Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	46 %		51.90 %		45 %		0.00 %		-		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00%	
2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaa			1,056,164				748,946		107,569		-		-		-		107,569		107,569		10,18%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
			Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																				
			Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	1500 perusahaan		1551 perusahaan		1400 perusahaan		449 perusahaan		-		-		-		449 perusahaan		2000 perusahaan		133.33%	
2.18.05.2.01.0005			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		283,670			182.077		0		-		-		-		0		0		0,00%	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	290 Pelaku Usaha		289 Pelaku Usaha		280 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha		-		-		-		0 Pelaku Usaha		289 Pelaku Usaha		99.66%	
2.18.05.2.01.0006			Pengawasan		772,494			566.869		107.569		-		-		-		107.569		107.569		13,92 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
		Penanaman Modal																					
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2960	Kegiatan Usaha	3047	Kegiatan Usaha	2930	Kegiatan Usaha	523	Kegiatan Usaha	-	-	-	-	523	Kegiatan Usaha	3570	Kegiatan Usaha	102.94%			
2.18.06		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal			377,020		125,775		89,139		16,823	-	-	-	-		16,823		16,823			4,46%	
			jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20	lembaga	23.00	lembaga	20	lembaga	5.00	lembaga	-	-	-	-	5.00	lembaga	5.00	lembaga	25.00%			
2.18.06.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan			377,020				89,139		16,823	-	-	-	-		16,823		16,823			4.46%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
		yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																					
			Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	500 perusahaan		407 perusahaan		450 perusahaan		120 perusahaan	-	-	-	-	120 perusahaan		527 perusahaan		105.40%				
2.18.06.2.01.000 2			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		377,020			89.139		16.823	-	-	-	-	16.823		16.823		4,46%				
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		0 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen		4 Dokumen		100.00%				

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
			secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan																				

## BAB III

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### III.1. Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

**a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan mengacu pada :**

- Visi dan Misi yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kota Surabaya.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Strategis Pembangunan Kota Surabaya yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026, dari 5 Misi pembangunan Kota Surabaya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya menjalankan Misi 1 dan 4 dengan tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

**- Misi 1**

Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional.

**Tujuan :**

Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenagakerja dan pengentasan kemiskinan

**Sasaran :**

Meningkatnya Jumlah Investor PMA/PMDN

**- Misi 4**

Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

**Tujuan :**

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif

**Sasaran :**

- Mengelola sarana dan prasarana perangkat daerah
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik

**b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya pada Tahun 2025 menjalankan mandat 6 Program dan 10 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 22.557.252.144, adapun program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat perubahan yang terletak pada nilai pagu indikatif. Semula nilai pagu indikatif sebesar Rp. 16,776,984,276 dan pada tahap Rancangan menjadi Rp. 17,082,209,472. Perubahan pagu dikarenakan terdapat penyesuaian alokasi terkait penerimaan CASN TA 2025 dan alokasi pemenuhan belanja dari 10 bulan menjadi 12 bulan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17,082,209,472,- Indikator Program Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan dengan output 92% tersebut diatas didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN target output 39 orang.
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan perlengkapan kantor yang disediakan target output 12 laporan.
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan target output 12 laporan.

**2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdapat perubahan yang terletak pada nilai pagu indikatif pada Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. Semula nilai pagu indikatif sebesar Rp. 460.002.665 berubah menjadi Rp. 490,806,629, perubahan pagu dikarenakan pemenuhan belanja dari 10 bulan menjadi 12 bulan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 490,806,629,- Indikator Program Jumlah Investor PMA/PMDN dengan target output 210 perusahaan tersebut diatas didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi kabupaten/kota target output 4 dokumen.

### **3. Program Promosi Penanaman Modal**

Program Promosi Penanaman Modal, terdapat perubahan yang terletak pada nilai pagu indikatif Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota. Semula nilai pagu indikatif sebesar Rp. 645,142,619 berubah menjadi Rp. 668,046,592, perubahan pagu dikarenakan pemenuhan kebutuhan belanja dari 10 bulan menjadi 12 bulan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 668,046,592,- Indikator Program persentase calon investor/investor yang mempunyai minat berinvestasi dengan target output 60% tersebut diatas didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota target output 3 dokumen.

### **4. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program Pelayanan Penanaman Modal, terdapat perubahan yang terletak pada nilai pagu indikatif. Semula nilai pagu indikatif sebesar Rp. 3.053.940.362 berubah menjadi Rp. 3,405,595,330, perubahan pagu dikarenakan pemenuhan belanja dari 10 bulan menjadi 12 bulan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,405,595,330,- indikator Program ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal dengan target output 100% tersebut diatas didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan indikator jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan

terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik target output 14.000 pelaku usaha.

- b. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko dengan indikator Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha target output 12.000 kegiatan usaha.

#### **5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdapat perubahan yang terletak pada nilai pagu indikatif. Semula nilai pagu indikatif sebesar Rp. 748.945.580 berubah menjadi Rp. 810,478,908, perubahan pagu dikarenakan pemenuhan kebutuhan belanja dari 10 bulan menjadi 12 bulan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 810,478,908,- indikator Program persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis dengan target output 45% tersebut diatas didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu:

- a. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha dengan indikator Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko target output 280 pelaku usaha.
- b. Pengawasan Penanaman Modal dengan indikator Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha target output 2930 kegiatan usaha.

#### **6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdapat perubahan yang terletak pada nilai pagu indikatif. Semula nilai pagu indikatif sebesar Rp. 89,139,356 berubah menjadi Rp. 100,115,213, perubahan pagu pemenuhan kebutuhan belanja dari 10 bulan menjadi 12 bulan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100,115,213,- indikator Jumlah

Permohonan Pemanfaatan Data Investasi Dan Penanaman Modal dengan target output 20 lembaga tersebut diatas didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

- a. Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizimam Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan indikator Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan target output 4 dokumen.

Adapun empat (4) perubahan Target, sebagai berikut:

No	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Alasan Perubahan
	Tujuan/ Sasaran/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Tujuan/ Sasaran/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	
1	<b>Tujuan</b> “Meningkatnya Investasi Daerah”	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	5,49%	<b>Tujuan</b> “Meningkatnya Investasi Daerah”	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	6,90%	1. Analisa berdasarkan proyeksi investasi di Kota Surabaya dan Perkembangannya berdasarkan Peningkatan Nilai Investasi Daerah;
2	<b>Sasaran</b> “Meningkatnya Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah”	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	54 Triliyun	<b>Sasaran</b> “Meningkatnya Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah”	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	42,69 Triliyun Rupiah	2. Analisa berdasarkan Target Investasi Nasional; dan 3. Analisa berdasarkan saran dan masukan tenaga ahli/narasumber/akademisi.
3	<b>Kegiatan</b> “Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota”	Jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan	95.000 Berkas	<b>Kegiatan</b> “Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota”	Jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan	110.000 Berkas	Realisasi jumlah berkas yang telah terbit tahun 2024 sebesar 117.393 dan tahun 2025 tidak ada rekomendasi penelitian, magang dan AK1.
4	<b>Subkegiatan</b> “Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN”	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37orang/ bulan	<b>Subkegiatan</b> “Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN”	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/ bulan	Penyesuaian Penambahan Personil PPPK dan CPNS Semula 37 orang/bulan menjadi 39 orang/bulan.

Adapun rencana Program dan kegiatan beserta tolak ukur kinerja dan pagu indikatif dapat diuraikan sebagai secara detail pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	<b>2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92 %	<b>16,776,984,276</b>	<b>2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92 %	<b>17,082,209,472</b>	
	<b>2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	<b>12,196,868,050</b>	<b>2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	<b>12,840,197,240</b>	
	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	12,196,868,050	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	12,840,197,240	

			Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100 %	4,580,116,226	2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100 %	4,242,012,232	
			Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100 %				Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100 %		
	2.18.01.2.08.0003	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	195,406,200	2.18.01.2.08.0003	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	182,581,840	
	2.18.01.2.08.0004	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,384,710,026	2.18.01.2.08.0004	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,059,430,392	

2	<b>2.18.02 PROGRAM PENGEMBAN GAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		Jumlah Investor PMA/PMD N	210 Perusah aan	<b>460,002,66 5</b>	<b>2.18.02 PROGRAM PENGEMBAN GAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		Jumlah Investor PMA/PMD N	210 Perusah aan	<b>490,806,62 9</b>	
	<b>2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</b>		Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	76 %	<b>460,002,66 5</b>	<b>2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	76 %	<b>490,806,62 9</b>	
	2.18.02.2.0 2.0004 Penyusuna n Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	4 Dokume n	<b>460,002,66 5</b>	2.18.02.2.02.000 4 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	4 Dokume n	<b>490,806,62 9</b>	
3	<b>2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestas i	60 %	<b>645,142,61 9</b>	<b>2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestas i	60 %	<b>668,046,59 2</b>	
	<b>2.18.03.2.01 Penyelengg</b>		Jumlah Calon	300 Calon	<b>645,142,61 9</b>	<b>2.18.03.2.01 Penyelenggaraa</b>		Jumlah Calon	300 Calon	<b>668,046,59 2</b>	

			Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	Investor / Investor		n Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	Investor / Investor		
	2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	645,142,619	2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	668,046,592	
4	<b>2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100 %	<b>3,053,940,362</b>	<b>2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100 %	<b>3,405,595,330</b>	
	<b>2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu</b>		jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non	95.000 berkas	<b>3,053,940,362</b>	<b>2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman</b>		jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non	95.000 berkas	<b>3,405,595,330</b>	

			Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan			Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan			
			Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya dilakukan pemantauan	12.000 Kegiatan usaha				Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya dilakukan pemantauan	12.000 Kegiatan usaha		
	2.18.04.2.01.0006	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	14.000 Pelaku Usaha	2,431,360,873	2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	14.000 Pelaku Usaha	2,752,620,961	

		2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12.000 Kegiatan Usaha	622,579,489		2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12.000 Kegiatan Usaha	652,974,369	
5	<b>2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>			Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti	45 %	<b>748,945,580</b>		<b>2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti	45 %	<b>810,478,908</b>	

			bimbingan teknis					bimbingan teknis			
	<b>2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	1.400 perusahaan	<b>748,945,580</b>	<b>2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	1.400 perusahaan	<b>810,478,908</b>	
	2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	280 Pelaku Usaha	182,076,962	2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	280 Pelaku Usaha	182,076,962	

		2.18.05.2.0 1.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaa n Perizinan Berusaha	2930 Kegiatan Usaha	566,868,61 8		2.18.05.2.01.000 6 Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaa n Perizinan Berusaha	2930 Kegiatan Usaha	628,401,94 6	
		<b>2.18.06 PROGRAM PENGELOLA AN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		jumlah permohonan pemanfaat an data investasi dan penanama n modal	20 lembaga	<b>89,139,356</b>		<b>2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		jumlah permohonan pemanfaat an data investasi dan penanama n modal	20 lembaga	<b>100,115,21 3</b>	

	<b>2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>		Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	450 perusahaan	89,139,356	<b>2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	450 perusahaan	<b>100,115,213</b>	
	2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	89,139,356	2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	100,115,213	

### III.2. Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Inovasi yang berbentuk layanan, metode dan solusi akan dijalankan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan memenuhi kebutuhan dalam melayani masyarakat daerah.

#### 1 Inovasi Sarana Prasarana dan Informasi Pelayanan Publik

a) Suara Perizinan (On Air di Media)

Sosialisasi melalui media on-air Media ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Mal Pelayanan Publik Siola.

b) Call Center Siaga Perizinan

Pelayanan call center merupakan salah satu elemen kunci dalam memperkuat komunikasi antara instansi pemerintah dengan masyarakat. Di era digital ini, kebutuhan akan layanan yang cepat, responsif, dan dapat diakses kapanpun menjadi sangat penting. Untuk itu, pengembangan call center yang modern dan terintegrasi menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

c) Layanan Drive Thru

Pembuatan jalur drive-thru sebagai fasilitas pengambilan berkas yang aman dan efisien bagi masyarakat. Desain area drive-thru yang dapat mengakomodasi kendaraan roda empat dan roda dua dengan lancar dan tertata. Selain itu penyediaan tempat parkir sementara untuk menunggu antrian di area drive-thru.

d) Penambahan Akses Masuk ke Mal Pelayanan Publik

Peningkatan fasilitas untuk akses masuk lewat lift di Jalan Tunjungan merupakan upaya penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan memudahkan akses bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas, pengguna kendaraan, serta masyarakat umum. Saat ini, fasilitas yang ada masih kurang memadai dalam hal kenyamanan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan pengguna kendaraan.

e) Penambahan fasilitas dan akses untuk Difabel

Penambahan fasilitas dan akses untuk memberikan kemudahan bagi pemohon yang memiliki keterbatasan khusus. Seperti pembangunan jalur khusus difabel

yang sesuai dengan standar, menggunakan bahan yang tidak licin dan tahan lama. Pemasangan rambu petunjuk dan garis bantu visual untuk memudahkan navigasi penyandang disabilitas. Penyediaan area parkir khusus yang terdekat dengan akses utama untuk difabel.

## 2 Inovasi Perizinan

### a) Dashboard Ketepatan Waktu Dan Tim Analisa

Membentuk dashboard ketepatan waktu perizinan untuk memudahkan pemantauan waktu pemrosesan perizinan dan tim analisa berkas untuk membantu pemohon melengkapi berkas yang kurang tanpa ada pengembalian berkas.

### b) Integrasidatabase Perizinan

Optimalisasi dan integrasi database terkait perizinan mulai dari data kependudukan, nomor induk berusaha, data lokasi, data persyaratan dasar perizinan berusaha, data perizinan non berusaha dan non perizinan, serta data pendukung lainnya seperti nomor induk bidang dan NOP PPB. Dengan terintegrasinya data akan memudahkan pemantauan terkait kepatuhan perizinan dan memberikan kemudahan masyarakat dalam memenuhi persyaratan yang ada. Data yang ada saat ini dapat diakses oleh dpmpstsp namun masih lintas aplikasi sehingga kurang efisien.

### c) Penyederhanaan Regulasi Perizinan

Pembuatan PERWALI untuk dasar hukum dalam penyederhanaan persyaratan perizinan dan percepatan pelayanan perizinan serta perubahan sistem untuk menghindari adanya campur tangan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.

### d) Integrasi Sistem Pemantauan Perizinan

Membuat sistem aplikasi pemantauan yang terintegrasi untuk semua perizinan sehingga pada saat akan dilakukan pengawasan oleh satu PD Teknis maka, hasil pengawasan juga akan terbaca oleh DPMPSTSP atau PD Teknis lainnya yang bersangkutan.

### e) Efektivitas Sosialisasi Perizinan (Melalui Sosial Media)

Membuat konten sosialisasi yang terfokus pada metode per perizinan agar lebih tepat sasaran serta peningkatan kompetensi penyuluh/ petugas perizinan.

### f) Ai Penapisan Jenis Perizinan Kegiatan Usaha

Membuat Artificial intelligence (AI) penapisan jenis perizinan kegiatan usaha

untuk memudahkan pemohon dalam pemenuhan izin usahanya. AI ini bentuk sinergi sistem antara data KBLI di DPMPSTSP dengan data tata ruang di DPRKPP, data penapisan jenis dan kewenangan penerbitan dokumen lingkungan di DLH, data penapisan kelas jalan dan kewenangan penerbitan amdallalin di DISHUB, kebutuhan rekom teknis seperti drainase dan proteksi kebakaran dalam persetujuan PBG dan/atau SLF di DPKP. Sistem AI ini menghasilkan informasi jenis izin yang wajib dimiliki oleh pemohon secara riil.

### **3 Inovasi Penanaman Modal**

#### **a) Penyusunan Blueprint Kebijakan Penanaman Modal**

Dalam dokumen strategis ini, pemerintah kota mengedepankan pengembangan sektor-sektor unggulan seperti infrastruktur, pariwisata, teknologi informasi, serta industri kreatif, sembari memberikan insentif yang kompetitif kepada investor untuk meningkatkan nilai realisasi investasi secara signifikan.

#### **b) Tim Percepatan Investasi Kota Surabaya**

Tim Percepatan Investasi Kota Surabaya adalah unit strategis yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung upaya akselerasi realisasi investasi dan menjaga iklim investasi yang kondusif. Tim ini berfungsi sebagai motor penggerak yang menjembatani komunikasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan calon investor, sekaligus memastikan bahwa proses investasi berjalan secara efisien dan transparan.

#### **c) Evening Tea**

Kegiatan kolaborasi yang digagas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kota Surabaya untuk mempererat hubungan antara pemerintah, asosiasi, pelaku usaha, Akademisi dan media.

#### **d) Investment Roadshow**

Kegiatan promosi investasi strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah, perusahaan, atau asosiasi untuk memperkenalkan berbagai peluang investasi kepada calon investor di berbagai lokasi, baik di dalam negeri maupun Luar Negeri.

#### **e) Surabaya Investment Week**

Kegiatan strategis yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk mempromosikan potensi investasi unggulan di Kota Surabaya.

- f) SIPINTAR (Sistem Informasi Perijinan dan INvestasi koTA suRabaya)  
Suatu layanan Chatbot yang dapat diprogram untuk menjawab pertanyaan umum secara otomatis, mengurangi beban kerja staf layanan pelanggan dan mempercepat waktu respon.

## BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025.

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 26 Juni 2025

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Lasidi, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 197612252006041013